

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG



JL. Beringin II No.35 Telp.(0721) 481301 TelukBetung 35222
Email : bkd.lampungprov@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua, sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 dapat terselesaikan penyusunannya dengan baik. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2025 disusun sebagai implementasi tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan rancangan awal sebagai faktor mendasar guna lebih mengarahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah agar selaras dengan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah atau pedoman untuk rencana tindak kegiatan BKD Provinsi Lampung Tahun 2025.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja BKD Tahun 2025 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Bandar Lampung,

2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



MEIRY HARIKA SARI, S.STP.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19770505 199712 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
Daftar Isi		i
Daftar Tabel		iii
BAB I Pendahuluan		
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Landasan Hukum		3
1.3 Maksud dan Tujuan		4
1.4 Sistematika Penulisan		5
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capain		6
Renja Terhadap Capaian Renstra		
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....		23
2.3.Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD		
Provinsi Lampung.....		25
2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....		29
2.5.Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku		
Kepentingan Pembangunan.....		31
BAB III Tujuan dan Sasaran		
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....		33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....		34
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah		38
BAB V Penutup		40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 Yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi BKD Provisni Lampung.....	24
Tabel 2.2. Tujuan,Sasaran,Indikator Sasaran,danTarget Kinerja Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026.....	25
Tabel TC. 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 BKD Provinsi Lampung.....	31
Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	35
Tabel 4.1 Indikator Kinerja BKD Provinsi Lampung.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal dalam menjalankan suatu organisasi, dimana perencanaan berfungsi membantu para pengambil kebijakan dalam menetapkan tujuan yang ingin dicapai terutama untuk menyusun strategi dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Perencanaan dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan, sebagai cara untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan, meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk memperkecil pemborosan dan meminimalisir tumpang tindih pelaksanaan kegiatan. Serta perencanaan dilakukan dalam rangka menetapkan standar yang akan dipakai untuk mempermudah pengawasan.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Awal RENJA Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 125 s.d. 143 beserta lampiran tentang penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Ranwal Renja ini juga mengacu pada Kepmendagri Nomor

900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan serta memperhatikan keselarasan dengan program pemerintah pusat. Penyusunan Renja dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- a. Tahap Perumusan Rancangan Awal Renja PD
- b. Tahap Perumusan Rancangan Renja PD
- c. Tahap Perumusan Rancangan Akhir Renja PD

Selain itu, Rencana kerja Perangkat Daerah juga memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan bersifat indikatif. Keterkaitan Rencana Awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Rencana Kerja BKD Provinsi Lampung harus mendukung dalam mewujudkan visi pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dari keterkaitan perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Rencana Awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2025. Sedangkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan hukum penyusunan Ranwal Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen RENJA BKD Provinsi Lampung Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah yang selanjutnya diteruskan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Lampung dalam jangka pendek (satu tahun) yaitu untuk tahun 2025.

Tujuan yang hendak dicapai dari RENJA BKD Provinsi Lampung ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang komprehensif tentang rencana program, dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.
- b. Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.
- c. Menjadi landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja BKD Provinsi Lampung Tahun 2025 (Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Lampung
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah dan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

IV. Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah

V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renja terhadap Renstra

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja perangkat Daerah Provinsi Lampung, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung untuk TA 2023 melaksanakan 2 program, 9 kegiatan dan 29 sub kegiatan.

Program dan Kegiatan diampu oleh empat bidang, dan satu sekretariat, yaitu antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 3 sub kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 8 sub kegiatan :
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan/Material

6. Fasilitas Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari 3 sub kegiatan
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Kepegawaian Daerah

- a. Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, yang terdiri dari 5 sub kegiatan :
 1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 2. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 3. Fasilitas Lembaga Profesi ASN
 4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 5. Pengelolaan Data Kepegawaian
- b. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, yang terdiri dari 3 sub kegiatan :
 1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
 2. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 3. Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
- c. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 2. Pembinaan Disiplin ASN
- d. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

1. Pengelolaan Mutasi ASN
2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
3. Pengelolaan Promosi ASN

BKD Provinsi Lampung untuk TA 2023 mengemban pelaksanaan 1 program, 9 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Total Pagu Anggaran tahun 2023 adalah **Rp. 26.472.111.959** dengan realisasi anggaran APBD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV BKD Provinsi Lampung adalah sebesar **Rp. 25.594.837.637**. Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran pada Renja Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan program penunjang suatu perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan administrasi perkantoran sebagai sarana pelayanan di bidang kepegawaian dengan pagu anggaran Rp. 17.196.183.424,- dan terealisasi sebesar 98.51% dan dengan indikator kinerja program adalah Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Indikator kinerja Persentase kesesuaian dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99.40% yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan capaian realisasi anggaran sebesar 98.26% dengan target 13 dokumen yang telah tersusun.

b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah dengan capaian realisasi anggaran sebesar 98.84% dengan target 9 dokumen yang telah terevaluasi.

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Indikator kinerja Persentase kesesuaian dokumen keuangan dan aset Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pengelolaan keuangan perangkat daerah dengan target kinerja yaitu terbayarnya gaji PNS dan tunjangan PNS BKD Provinsi Lampung dan realisasi anggaran sebesar 98.59%

b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran dengan total kinerja 24 Laporan yang telah tersusun sampai dengan akhir tahun dan capaian realisasi anggaran 99.96%

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Indikator kinerja Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan, yang terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket komponen peralatan listrik/penerangan bangunan kantor dengan target kinerja 12 paket, sehingga realisasi anggaran dari sebesar 99.92%.

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi anggaran sebesar 99%.

c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga dengan realisasi anggaran 99.95%.

d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah paket barang cetak dan penggandaan dengan target kinerja 12 paket , sehingga realisasi anggarannya sebesar 100%.

e) Penyediaan Bahan/Material

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah paket bahan/material dengan target 12 paket, sehingga realisasi anggaran 100%

f) Fasilitas Kunjungan Tamu

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan fasilitas kunjungan tamu dengan target 30 laporan sehingga realisasi anggaran sebesar 98.94%

g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah lapran penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target kinerja 61 laporan sehingga realisasi anggaran 96.18%

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Indikator kinerja Persentase pelayanan Jasa perkantoran yang tersedia yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 12 laporan dan capaian realisasi anggaran sebesar 79.04%

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum dengan target 12 laporan dan capaian realisasi anggaran 100%.

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Indikator kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik yang tersedia yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan target kinerja 21 unit sehingga capaian realisasi anggaran 95.57%

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja 46 unit, sehingga realisasi anggaran 100%

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara yaitu 1 unit dengan realisasi capaian anggaran 99.99%

B. Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah merupakan program utama dalam rangka pencapaian sasarannya yaitu meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dengan pagu anggaran Rp. 9.275.928.535,- terealisasi sebesar 93.30%. Indikator kinerja program adalah Persentase administrasi kepegawaian yang ditingkatkan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Dengan Indikator kinerja Persentase sistem informasi kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian yang terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, Jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan Pengadaan dengan dengan capaian realisasi anggaran 96.57%. Berikut realisasi fisiknya antara lain:

Pengurusan Administrasi PNS

No	Kegiatan	Jumlah
1.	<u>Administrasi PNS</u> -Kartu pegawai -Kartu suami -Kartu istri	- 203 orang 223 orang
2.	<u>Kelengkapan Administrasi Kepegawaian</u> -CPNS ke PNS -Penerbitan SK Jabatan Pelaksana (yang sudah disesuaikan dengan perubahan dalam Permenpan 41 Tahun 2018)	54 orang

b) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian dengan capaian realisasi anggaran 99.33%. Berikut realisasi fisiknya antara lain:

Rekap PNS memasuki Batas Usia pensiun Tahun 2022

Jenis Pensiun	Jumlah/Orang
Batas Usia Pensiun	715
Janda/Duda	53
Atas permintaan sendiri (hak pensiun)	7
Masa Persiapan Pensiun	6
Tewas	1
Uzur	

c) Fasilitas Lembaga Profesi ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi dan capaian realisasi anggaran 97.83%. Berikut realisasi fisiknya antara lain:

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Pembekalan PNS yang akan memasuki masa Phurna Bhakti	Terlaksana
2.	Hut Provinsi	Terlaksana
3.	Hut Korpri	Terlaksana
4.	Rapat Koordinasi KORPRI kab/kota se Prov Lampung	Terlaksana
5.	Pembinaan KORPRI kab/kota	Terlaksana

d) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian dengan

target kinerja 185 dokumen dan capaian realisasi anggaran 99.95%.

No	Jenis	Jumlah
1.	Buku saku kecil	96 buku
2.	Buku saku besar	96 buku
3.	BukuPenjagaan KGB	12 buku
4.	Buku daftar urut kepangkatan	4 buku

e) Pengelolaan Data Kepegawaian

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian dengan capaian realisasi anggaran 74.06%. dengan target kinerja 15.000 dokumen yang dapat diakuratkan.

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	3500 dokumen	Triwulan I
2.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	3500 dokumen	Triwulan II
3.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	4000 dokumen	Triwulan III
4.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	4000 dokumen	Triwulan IV

b. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Dengan Indikator kinerja Persentase pengembangan jabatan sesuai kompetensi, ujian dinas, upkp dan Penataan dan Pembinaan jabatan fungsional yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

a) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya dengan target kinerja 595 orang dan capaian realisasi anggaran 47.79%.

Diklatpim				Prajabatan Umum		Diklat Teknis Fungsional
I	II	III	IV	Gol II	Gol III	
-	2 orang	16 orang	-	-	-	24 orang

b) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan dengan target kinerja 350 dan capaian realisasi anggaran 91.26% dan realisasi fisiknya yaitu terlaksananya pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, serta terlaksananya proses pengantaran Praja IPDN.

NO	UJIANDINASDANUPKP	JUMLAH
1.	UJIANPENYESUAIANKENAIKANPANGKAT	
	S2	16
	S1	59
	D-III	1
	SMA	-
	TOTAL	76
2.	UJIANDINAS	
	TINGKATI	161
	TINGKATII	28
	TOTAL	189
3.	IPDN	
	PENGANTARANCAPRAASALLAMPUNG	18
	PENJEMPUTANPRAJAIPDNTAHUN.2023	49
4.	TUGAS BELAJAR	
	S2	1

c) Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional dengan target kinerja 200 dokumen dan capaian realisasi anggaran 99%

Realisasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional

SK pengangkatan dalam jabatan Fungsional	Tingkatan	Jumlah
	Pengangkatan pertama kali dalam jabatan	467
	Pengangkatan kembali	10
	Pemberhentian	35
	Pemberhentian dari jabatan lain	53

c. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Dengan Indikator kinerja Persentase kinerja aparatur dan Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dengan capaian realisasi anggaran 96.32% dan hasil kinerja evaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

Pemberian Penghargaan SLKS di Tahun 2023

MASA KERJA	JUMLAH
XXX	160
XX	119
X	422

2. Pembinaan Disiplin ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang mendapatkan

pembinaan disiplin dengan capaian realisasi anggaran 98.77% dan hasil kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Pelanggaran Disiplin PNS Tahun 2023

NO	JENIS HUKUMAN	JUMLAH
1.	Hukuman Disiplin Ringan	7 orang
2.	Hukuman Disiplin Sedang	13 orang
3.	Hukuman Disiplin Berat	13 orang
JUMLAH		33 orang

d.

e. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Dengan Indikator kinerja Persentase pelayanan administrasi ASN dan penataan jabatan ASN Lampung yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Pengelolaan Mutasi ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana, dan mutasi ASN antar daerah dengan capaian realisasi anggaran 99.90% dan hasil kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Tahun 2023

Keterangan	Jumlah
Antar instansi	40
Prov Lampung ke.kab/kota	10
Kab/kota ke.Provinsi lampung	21
Antar kab/kota di Provinsi lampung	200
Prov lain ke.kab/kota Provinsi lampung	1
Kab/kota Prov lampung ke.Provinsi lain	-
Prov lampung keluar Provinsi lain	-
Prov lain masuk ke Provinsi lampung	-
JUMLAH	272

2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah pengelolaan kenaikan Pangkat ASN dengan capaian realisasi anggaran 99.86% dan hasil kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2023

Bulan	2023
I	5
II	212
III	1421
IV	576
Total	2214

Surat SK Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2023

Golongan	Jumlah
I	20
II	682
III	4220
IV	2617
Total	5.493

a) Pengelolaan Promosi ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengembangan promosi ASN dengan capaian realisasi anggaran 99.39% dan hasil kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

Pelantikan Pejabat Tahun 2023

Esselon/Pejabat	Jumlah
II (JPTP)	13
III (Administrator)	20
IV (Pengawas)	-
Total	33

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah	Keterangan
1.	Uji Kompetensi	20 Desember 2022 s/d 30 Januari 2023	3 Pejabat PTP	Dalam rangka mutasi mengisi jabatan yang lowong
2.	Seleksi Terbuka	13 Maret s/d 28 Mei 2023	Pelamar Seleksi terbuka yang memenuhi syarat 38 orang	Terdapat 7 JPTP yang lowong, namun pada tahap akhir hanya terdapat 6 JPTP yang terisi

Berdasarkan data realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan diatas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik sampai dengan Triwulan IV ini adalah sebesar 96,69%.

Pada Tahun 2023 target Kinerja sasaran Pertama sebesar 75% sedangkan hasil target kinerja yang telah dilaksanakan 73.15%, dapat dikatakan kinerja yang telah dilaksanakan telah berhasil. Pada sasaran kedua target kinerja sebesar 91% sedangkan hasil target kinerja yang telah dilaksanakan sebesar 87.5%, dapat dikatakan kinerja yang telah dilaksanakan telah berhasil.

No	Sasaran	IndikatorSasaran	Target 2023	Realisasi
1.	Melaksanakan penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	75%	73.15%
2.	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	91%	87.5%

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 tahun 2017 tentang tahapan Penyajian Rancangan Renja Perangkat Daerah, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah belum disusun, maka dapat dibuatkan rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah, yang dapat dilihat melalui tabel beriku

Evaluasi Renja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023 Triwulan 4

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian RENSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4		5=n-1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100		11	12
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	59.648.317.050	100	15.882.665.593	100	17.196.183.424	97,5	16.940.243.521	97,50	96,51	97,5	32.822.909.114	97,50	55,03	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	426.207.647	100	149.100.000	100	140.200.000	100	146.610.000	100,00	96,26	100	295.710.000	100,00	69,38	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	52	224.579.064	13	74.710.000	13	74.000.000	13	73.145.000	100,00	98,84	26	147.855.000	50,00	65,84	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	36	201.628.583	9	74.390.000	9	75.200.000	9	73.465.000	100,00	97,69	18	147.855.000	50,00	73,33	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dan aset Perangkat Daerah	100	49.492.174.046	100	12.732.004.870	100	13.288.011.122	100	13.100.277.283	100,00	96,59	100	25.832.282.153	100,00	52,19	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kesesuaian Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	56	49.384.420.921	14	12.705.757.270	14	13.258.011.122	14	13.070.286.283	100,00	96,58	28	25.776.045.553	50,00	52,19	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	96	107.753.125	24	26.247.600	24	30.000.000	24	29.989.000	100,00	99,96	48	56.236.600	50,00	52,19	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan	100	4.891.214.717	100	2.018.603.298	100	2.225.149.847	87,5	2.208.388.170	87,50	96,25	87,5	4.226.991.468	87,50	86,42	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi yang Disediakan	48	32.771.173	12	7.982.200	12	5.169.900	12	5.165.900	100,00	99,92	24	13.148.100	50,00	40,12	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Disediakan	48	2.080.920.592	12	799.649.300	12	1.220.716.510	12	1.208.470.700	100,00	99,00	24	2.008.120.000	50,00	96,50	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Disediakan	48	34.481.000	12	8.399.800	12	8.000.000	12	7.995.800	100,00	99,95	24	16.395.600	50,00	47,55	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.1.6.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Disediakan	48	86.202.500	12	21.000.000	12	21.000.000	12	21.000.000	100,00	100,00	24	42.000.000	50,00	48,72	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.1.6.7	Penyediaan Bahan / Material	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Disediakan	48	130.981.208	12	39.999.800	12	20.000.000	12	19.999.100	100,00	100,00	24	59.998.900	50,00	45,81	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.1.6.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Disediakan	120	107.753.125	30	28.922.700	30	44.000.000	30	43.535.000	100,00	98,94	60	72.457.700	50,00	67,24	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Disediakan	244	2.418.105.119	61	1.112.649.498	61	906.263.437	61	902.221.670	100,00	99,55	122	2.014.871.168	50,00	83,32	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa perkantoran yang tersedia	100	3.551.553.530	100	566.933.840	100	918.748.055	100	883.682.848	100,00	96,18	100	1.450.616.688	100,00	40,84	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan jasa perkantoran yang tersedia	48	1.097.169.227	12	133.726.440	12	167.248.055	12	132.188.448	100,00	79,04	24	265.914.888	50,00	24,24	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan jasa perkantoran yang tersedia	48	2.454.384.303	12	433.207.400	12	751.500.000	12	751.494.400	100,00	100,00	24	1.184.701.800	50,00	48,27	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik yang tersedia	100	1.287.167.110	100	416.023.585	100	615.074.400	100	601.285.220	100,00	97,76	100	1.017.308.805	100,00	70,03	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Personel Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik yang tersedia	84	1.031.576.697	21	236.743.585	21	310.164.400	21	296.411.220	100,00	95,57	42	533.154.805	50,00	51,68	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik yang tersedia	184	124.562.613	46	30.260.000	46	30.930.000	46	30.930.000	100,00	100,00	92	61.210.000	50,00	49,14	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik yang tersedia	4	131.027.800	1	149.000.000	1	273.980.000	1	273.944.000	100,00	99,99	2	422.944.000	50,00	322,79	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase peringkat pelayanan administrasi kepegawaian	100	39.692.304.572	95,29	8.647.936.486	100	9.275.928.535	92,46	8.654.594.116	92,46	93,30	92,46	17.302.530.602	92,46	43,59	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.2.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase sistem informasi kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian	100	28.099.064.160	100	6.502.657.841	100	7.064.528.535	100	6.802.975.980	100,00	96,30	100	13.305.633.821	100,00	47,35	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.2.1.2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase sistem informasi kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian	36	23.879.447.361	9	5.519.330.405	9	6.269.106.690	9	6.054.119.008	100,00	96,57	18	11.573.448.413	50,00	48,47	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.2.1.6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase sistem informasi kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian	2.460	615	615	42.684.200	615	44.600.000	615	44.300.000	100,00	99,33	1.230	86.984.200	50,00	14.143.772,36	Badan Kepegawaian Daerah	

**Evaluasi Renja
Badan Kepegawaian Daerah
Tahun 2023 Triwulan 4**

Kode Relineking	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Pada Akhir Periode 2024		Realisasi Capaian Kinerja REHSTRA s/d Tahun 2022		Target Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Realisasi Kinerja Dari Anggaran Renja Provinsi 2023		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran Renja Provinsi 2023 (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian REHSTRA s/d Tahun 2023 (%)		Peningkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4		5=a.1		6		7		8=7/6*100		9=5+7		10=9/4*100			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5.3.2.1.8	Facilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase sistem informasi kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian	4	3.260.763.343	1	594.862.136	1	515.821.845	1	504.627.972	100,00	97,83	2	1.099.490.108	50,00	33,72	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.2.1.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase sistem informasi kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian	740	571.156.646	185	182.501.100	185	100.000.000	185	99.949.000	100,00	99,95	370	282.450.100	50,00	49,45	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.2.1.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase sistem informasi kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian	60.000	169.906.798	15.000	163.280.000	15.000	135.000.000	15.000	99.980.000	100,00	74,06	30.000	263.260.000	50,00	154,94	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.2.2	Mutasi dan Promo si ASN	Persentase pelayanan administrasi ASN dan penilaian jabatan ASN 4	100	5.569.667.657	100	951.902.700	100	1.281.000.000	100	1.204.867.700	100,00	94,06	100	2.156.770.400	100,00	38,72	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.2.2.1	Pengelolaan Mutasi ASN	persentase pelayanan administrasi ASN dan penilaian jabatan ASN	3.400	198.265.750	850	45.945.000	850	51.000.000	850	50.950.000	100,00	99,90	1.700	96.895.000	50,00	48,87	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.2.2.2	Pengelolaan Nekaikan Pangkat ASN	persentase pelayanan administrasi ASN dan penilaian jabatan ASN	56	527.170.527	14	104.620.800	14	80.000.000	14	79.885.000	100,00	99,86	28	184.505.800	50,00	35,00	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.2.2.3	Pengelolaan Promosi ASN	persentase pelayanan administrasi ASN dan penilaian jabatan ASN	40	4.844.231.380	10	801.336.900	10	1.150.000.000	10	1.074.032.700	100,00	93,39	20	1.875.369.600	50,00	38,71	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.2.3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pengembangan jabatan sesuai kompetensi, ujian dinas, upk dan Penilaian dan Pembinaan jabatan fungsional	100	4.581.874.128	81,18	865.660.740	100	780.000.000	69,84	500.646.436	69,84	64,19	69,84	1.366.307.176	69,84	29,82	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.2.3.1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase pengembangan jabatan, sesuai kompetensi, ujian dinas, upk dan penilaian dan pembinaan jabatan fungsional	2.380	2.472.443.267	259	588.321.840	595	500.000.000	250	238.932.936	42,02	47,79	509	827.254.776	21,39	33,46	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.2.3.4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase pengembangan jabatan, sesuai kompetensi, ujian dinas, upk dan penilaian dan pembinaan jabatan fungsional	1.400	1.843.340.964	350	203.346.400	350	200.000.000	280	182.515.000	80,00	91,26	630	385.861.400	45,00	20,93	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.2.3.14	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase pengembangan jabatan, sesuai kompetensi, ujian dinas, upk dan penilaian dan pembinaan jabatan fungsional	800	266.089.877	200	73.992.500	200	80.000.000	175	79.198.500	87,50	99,00	375	153.191.000	46,88	57,57	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.2.4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase kinerja aparatur dan kedisiplinan PNS Provinsi Lampung	100	1.441.678.627	100	327.715.205	100	150.400.000	100	146.104.000	100,00	97,14	100	473.819.205	100,00	32,87	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.2.4.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase kinerja aparatur dan kedisiplinan PNS Provinsi Lampung	48	1.229.148.518	12	224.036.700	12	100.000.000	12	96.324.000	100,00	96,32	24	320.360.700	50,00	26,06	Badan Kepegawaian Daerah	
5.3.2.4.7	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase kinerja aparatur dan kedisiplinan PNS Provinsi Lampung	60	212.530.109	15	103.678.505	15	50.400.000	15	49.780.000	100,00	98,77	30	153.458.505	50,00	72,21	Badan Kepegawaian Daerah	
Rata-rata capaian kinerja											96,88	96,69						
Predikat											Sangat Tinggi							

Sumber : Simonev.Bappeda.Provinsi Lampung

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian daerah Provinsi Lampung Nomor : 000.8.6.3/3728/VI.04/2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, yang menjelaskan bahwa Perubahan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, nomor B/175/AA.05/2024, tanggal 03 September 2024, perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 dan hasil Tim Evakuator bahwasanya perlu mengubah Indikator Kinerja Utama (IKU) guna untuk acuan kinerja yang lebih terukur dan lebih baik lagi serta menjadi salah satu faktor penunjang Indikator Strategis Pemerintah Provinsi Lampung.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan tugas pokoknya yaitu Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, memiliki keterkaitan dengan Misi-7RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 yaitu pada Misi ke-7 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan Sasaran yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.

Tujuan dan Sasaran RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 Yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi BKD Provisni Lampung

Visi(RPJPD) :		LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2025		
Misike-7 (RPJPD) :		Terwujudnya TataKelola Pemerintahan yang Baik		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Targettt Kinerja	
			2025	2026
1	2	3	4	5
Terwujudnya TataKelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	BB	BB

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi dan misi Provinsi Lampung yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu. Atas dasar Visi Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005–2025.

Selain didasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJPD, rumusan tujuan Perangkat Daerah juga disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta harus dapat diukur dalam jangka waktu 2 (dua) tahunan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung menetapkan Tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, sebagai berikut:

“Meningkatnya Manajemen ASN”

Pernyataan Tujuan jangka Panjang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung tersebut memiliki makna sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Memetakan setiap pegawai kedalam kotak talenta berdasarkan kualifikasi kinerja dan kompetensinya;
2. Implementasi peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan reformasi birokrasi merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggungjawab yang menjadi amanahnya.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah. Mengacu pada hal tersebut maka sasaran yang hendak dicapai Badan Kepegawaian Dearah Provinsi Lampung adalah :

“Terlaksananya Implementasi 8 Aspek Sistem Merit”

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 beserta Indikator Kinerja dan Target masing-masing Indikator Kinerja, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUNAN/ SASARAN PADA TAHUN	
				2025	2026
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Manajemen ASN	Terlaksananya Implementasi 8 Aspek Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	%	295	306

Pada Tabel 2.2 tergambar bahwa besaran target untuk indikator Persentase Peningkatan Indeks Sistem Merit pada tahun 2025 ke tahun 2026 sebesar 11% hal tersebut dapat diukur dari 8 aspek penilaian yang ditetapkan dalam aturan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara D Lingkungan Instansi Pemerintah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Lampung

Provinsi Lampung dalam menjabarkan kebijakan nasional khususnya yang menyangkut dengan pembangunan daerah dan mewujudkan pemerintahan yang baik, telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pemerintahan dan otonomi daerah, yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan guna mewujudkan pendayagunaan aparatur sebagai pelayan dan pengayom masyarakat, sehingga dapat menghindari terjadinya konflik wilayah dan konflik sektoral demi terwujudnya pembangunan daerah Lampung yang serasi dan merata di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

a. Isu – isu strategis tersebut antara lain :

1. Pemetaan pegawai di Provinsi Lampung sudah sesuai dengan kebutuhan Anjab/ABK yang ditetapkan oleh peraturan Gubernur No.G/326/VI.04/Hk/2021 tetapi baru sesuai kualifikasi jenjang pendidikan dan sebaiknya penempatan ASN berdasarkan kompetensi;

2. Sistem kinerja pegawai provinsi lampung sudah berbasis kinerja tetapi harus tetap melakukan pengembangan kinerja berbasis kompetensi;
3. Peningkatan kembali kualitas pelayanan publik;
4. Peningkatan sistem pelayanan yang bersifat online.

b. Permasalahan dan Hambatan

1. Kurangnya SDM Aparatur Badan Kepegawaian Daerah yang memiliki kemampuan IT;
2. Perlu melakukan peningkatan kompetensi dibidang pelayanan;
3. Kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang- undangan kepegawaian
4. Masih ada beberapa aparatur pemerintah yang penempatannya belum sesuai dengan disiplin ilmunya (analisis beban kerja (ABK) yang telah diterapkan pada setiap OPD);

c. Tantangan dan Peluang

Ketercapaian Pengembangan Pelayanan yang diberikan Badan Kepegawaian daerah Provinsi Lampung memiliki faktor pendorong untuk keberhasilan dan peningkatan kinerja agar lebih memaksimalkan pelayanan kepegawaian, antara lain :

- a. Tersedianya sarana prasarana yang terkait dengan pengembangan data base, seperti fiber optic untuk mendukung kualitas informasi dan layanan data kepegawaian. Dimasukkannya Bab tersendiri yang terkait dengan penguatan Sistem Informasi Kepegawaian database aparatur sipil negara dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Kewenangan untuk

melakukan perubahan database di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

- b. Meningkatnya efektifitas aplikasi SIMPEDU dalam menunjang manajemen kepegawaian, meningkatnya ketersediaan data dan informasi terkait kepegawaian, meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan SDM Aparatur
- c. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme SDM sesuai dengan tupoksi
- d. Menurunnya persentase tingkat pelanggaran disiplin pegawai dan pidana pegawai
- e. Meningkatnya SDM aparatur yang lulus diklat kepegawaian
- f. Program Penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur.
- g. Meningkatnya persentase CPNS yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan kebutuhan
- h. Peningkatan pengawasan secara menyeluruh terkait dengan pelayanan kepegawaian.
- i. Perlu adanya komitmen semua pihak untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan terutama terkait dengan pelayanan manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja dan merit sistem.
- j. Adanya pengawasan intern (audit internal kepegawaian) oleh pimpinan secara rutinitas dalam pelaksanaan pelayanan manajemen kepegawaian.
- k. Ketersediaan SDM aparatur yang siap dan mampu menduduki suatu jabatan melalui seleksi jabatan lowong secara terbuka.

- d. Isu-isu yang di tindak lanjuti ke dalam program kegiatan
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 Visi
Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung yang
dijabarkan pada RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-
2025, yaitu:

*** LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2025 “**

Visi tersebut dimaksudkan nya yaitu :

- a. Kehidupan masyarakat yang maju. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memiliki sistem dan kelembagaan politik, dan hukum yang mantap, serta berkehidupan demokratis, tidak diskriminatif dalam bentuk apapun, bebas berpendapat, menggunakan hak politik, kesamaan di depan hukum, menjunjung tinggi HAM, beretika, disiplin, tertib, serta menghargai profesi.
- b. Kehidupan Masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Masyarakat memperoleh perlindungan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban.

Dalam upaya menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Lampung, BKD Provinsi Lampung menempuh arah kebijakan sebagai berikut :

1. Pemetaan Pegawai sesuai dengan peta jabatan (penerimaan pegawai pindah mutasi dari instansi luar provinsi sesuai kebutuhan formasi yang kosong) dan rencana kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun berdasarkan anjab dan ABK.
2. Penempatan ASN berdasarkan pemetaan kompetensi kualifikasi dan kinerja ASN.
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar.

4. Pengisian jabatan sesuai dengan perjenjangan karier/pola karier melalui fit and properties berbasis kompetensi dan kinerja.
5. Pembinaan ASN dalam rangka peningkatan kinerja individu .
6. Penjatuhan hukuman disiplin dan atau pemberhentian terhadap ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
7. Pengembangan layanan kepegawaian berbasis aplikasi online sistem untuk percepatan processing data (kinerja, absensi, KGB, cuti, pensiun dan aplikasi kepegawaian yang lainnya).
8. Transaksi data kepegawaian melalui SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) terintegrasi dan akurat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ada 7 point pada arah pembangunan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) , yaitu :

1. Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing
2. Sistem Kesehatan yang terintegrasi dan handal
3. Perlindungan sepanjang hayat dan adaptif
4. Dukungan sektoral untuk mendorong pertumbuhan (infrastruktur konektivitas, mobilitas dan produktivitas)

5. **Birokrasi yang profesional dan berintegritas dengan penguatan SDM**
6. Reformasi penganggaran pusat dan daerah
7. Penguatan data (akurat, reliable dan terintegrasi)

Pada point ke 5 terkait Birokrasi yang profesional dan berintegritas dengan penguatan SDM selaras dengan tupoksi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung Gubernur Provinsi Lampung di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung selalu berkomitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma pada pengelolaan sumber daya manusia aparatur di bidang kepegawaian yang difokuskan pada aspek percepatan reformasi birokrasi sehingga nantinya akan terwujud pegawai PNS yang berkompeten, berkinerja tinggi dan profesional.

Reformasi sumber daya aparatur memerlukan adanya perubahan manajemen kepegawaian yang mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (PNS) yang memiliki kekuatan dan kemampuan serta daya saing yang semakin tinggi dan semakin mampu melaksanakan pencapaian tujuan dan program pemerintah dan pemerintah daerah. Bila dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja 5 (lima) tahun, permasalahan yang di hadapi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sedikit mengalami hambatan, maka alat ukur yang digunakan adalah dengan menggunakan metode SWOT dengan melakukan analisa baik di lingkungan internal maupun eksternal yang menjadi perhatian dan akan segera dicari solusinya, yaitu salah satunya ada adalah Profesionalisme ASN. Berikut review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022.

Tabel TC-31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Kepegawaian Daerah	BKD	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	80%	Rp. 7.689.668.885	Program Kepegawaian Daerah	BKD	Persentase Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	73.15%	Rp. 9.275.928.535	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp.16.091.865.780	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BKD	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.5%	Rp.17.196.183.424	

2.5 Penelaahan Usul Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Pembangunan

Program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi/asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sebagai lembaga teknis yang di bidang kepegawaian, mempunyai tugas

pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung selalu berkomitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma pada pengelolaan sumber daya manusia aparatur di bidang kepegawaian yang difokuskan pada aspek percepatan reformasi birokrasi sehingga nantinya akan terwujud pegawai PNS yang berkompeten, berkinerja tinggi dan profesional.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan Negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan public, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam RPJMN 2019-2024 masih terdapat beberapa isu strategis selama lima tahun kedepan, antara lain :

1. Profesionalitas ASN

Menurut data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum semua Provinsi dan Kabupaten / Kota menerapkan sistem merit, selanjutnya hirarki eselonisasi saat ini terdiri dari 5 level membuat proses pengambilan keputusan tidak efisien, sehingga perlu penyederhanaan eselonisasi serta perluasan jabatan fungsional dengan keahlian dan kompetensi yang semakin spesifik . Dari sisi kompetensi, jumlah tenaga spesialis di lingkungan ASN masih kurang, serta rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan ASN , terutama luar jawa. Dari sisi distribusi, persebaran ASN dengan keahlian tertentu / fungsional belum berbasiskan sektor unggul kewilayahan. Selain itu masih terdapat intervensi politik terutama dari Kepala Daerah dalam pengelolaan kepegawaian.

2. Aspek Kelembagaan dan Pelayanan Publik

Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan kelembagaan adalah dengan menerapkan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur dan Layanan. Selain itu, penerapan

inovasi pelayanan public secara elektronik (*e-service*) masih belum terintegrasi antar jenis layanan dengan tingkat kematangan (*maturitas*) yang beragam.

Berdasarkan hal tersebut pencapaian sasaran pokok ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui :
penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi serta penataan jabatan fungsional.
- b. Transformasi pelayanan publik melalui : pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik , penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung Gubernur Provinsi Lampung di dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung selalu berkomitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma pada pengelolaan sumber daya manusia aparatur di bidang kepegawaian yang sehingga nantinya akan terwujud pegawai PNS yang berkompeten, berkinerja tinggi dan profesional. Dalam rangka mewujudkan tujuan, dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 disusunlah strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026 melalui Visi dan Misi Provinsi Lampung:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025			
MISI : TERWUJUDNYA PEMERINTAH DAERAH YANG BERTATAKELOLA DAN BERORIENTASI KWIRAUSAHAAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Manajemen ASN	Terlaksananya Implementasi 8 aspek sistem merit	1. Perencanaan Kebutuhan	a. Perencanaan formasi dan pengadaan pegawai
			b. Harmonisasi pengajuan rencana kebutuhan formasi ke Kementerian PAN RB berbasis aplikasi
		2. Pengadaan	a. Penyusunan pemetaan pegawai sesuai rencana kebutuhan pegawai untuk 5 (lima) tahun berdasarkan anjab dan ABK
			b. Penerimaan pegawai pindah mutasi dari instansi luar provinsi sesuai kebutuhan formasi yang kosong
			c. Penempatan PNS berdasarkan pemetaan kompetensi PNS sesuai kebutuhan prioritas pembangunan daerah
		3. Pengembangan karier	a. Pengisian Jabatan administrator dan pengawas sesuai kompetensi
			b. Pelaksanaan uji kompetensi PNS dalam rangka penyusunan pemetaan kompetensi
			c. Fasilitasi pelaksanaan tugas belajar dan ijin belajar
			d. Data nominative PNS yang akan mengikuti diklat
		4. Promosi dan Mutasi	a. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui promosi terbuka
			b. Fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional tertentu
			c. Pengisian pejabat pelaksana berdasarkan kompetensi yang telah dilaksanakan
		5. Manajemen Kinerja	a. Pemanfaatan CAT-BKN dalam berbagai kegiatan manajemen kepegawaian
		6. Penggajian penghargaan	a. Pembinaan PNS dalam rangka peningkatan kinerja individu

VISI : LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025			
MISI : TERWUJUDNYA PEMERINTAH DAERAH YANG BERTATAKELOLA DAN BERORIENTASI KWIRUSAHAAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		dan disiplin	dan organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan PNS
			b. Penjatuhan hukuman disiplin dan atau pemberhentian terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin
		7. Perlindungan dan pelayanan	a. Pengembangan layanan kepegawaian berbasis aplikasi online sistem untuk percepatan processing data
			b. Penyediaan sarpras server dan infrastruktur penunjang pelayanan kepegawaian
			c. Penyediaan SDM penyelenggara IT bidang kepegawaian yang kompeten
			d. Pengembangan ruang layanan kepegawaian di BKD
		8. Sistem Informasi	a. Pengembangan layanan kepegawaian berbasis aplikasi online sistem untuk percepatan processing data kinerja
			b. Pengembangan aplikasi data dan informasi kepegawaian terintegrasi dalam SIMPEDU BKD Provinsi Lampung
			c. Adopsi pengembangan aplikasi layanan kepegawaian oleh Kab/Kota
			d. Update dan validasi data secara berkala
			e. Transaksi data kepegawaian melalui SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) terintegrasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung memiliki indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk Mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut disajikan indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung fungsi penunjang kepegawaian :

Tabel 4.1 Indikator Kinerja BKD Provinsi Lampung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUNAN/ SASARAN PADA TAHUN	
				2025	2026
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Manajemen ASN	Terlaksananya Implementasi 8 Aspek Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	%	295	306

Sumber : Rencana Strategis BKD Provinsi Lampung (2025-2026)

4.1.1 Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah

Dana indikatif Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 22.081.788.116,00 ,- yang terdiri dari 2 Program, 9 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan. Sumber dana tersebut berasal dari dana APBD. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dana indikatif serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 18.831.188.116 yang terdiri dari 5 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan.

2. Program Kepegawaian Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.250.600.000,- yang terdiri dari 4 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Kerja dibuat terkait dengan Visi dan Misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya kesepakatan dan penetapan kaidah-kaidah dalam penjabaran Rencana Kerja BKD, yaitu sebagai berikut.

1. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas Program Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung selama Tahun Anggaran 2023, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan.
2. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan selama tahun pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan.
3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2023 yang berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku. Evaluasi dimaksud meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan.

Rencana Awal Rencana Kerja Tahun 2025 seluruh

Perencanaan dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat umum serta bagi pengguna layanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Adapun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Provinsi Lampung

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2025				CATATAN PENTING	Perkiraan Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Plafon Anggaran Sementara (Rp)	Sumber Dana (APBD/ APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	8
Urusan Pendukung								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	18.831.188.116	APBD		100%	19.772.747.522
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	165.500.000	APBD		100%	173.775.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	13 dokumen	75.000.000	APBD		13 dokumen	78.750.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	9 laporan	90.500.000	APBD		9 laporan	95.025.000
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen keuangan dan aset Perangkat Daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	16.740.058.352,00	APBD		100%	17.577.061.270
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	BKD PROVINSI LAMPUNG	14 orang/bulan	16.700.058.352,00	APBD		14 orang/bulan	17.535.061.270
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan / triwulan / semesteran / SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran BKD	BKD PROVINSI LAMPUNG	24 laporan	40.000.000	APBD		24 laporan	42.000.000
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	796.850.309	APBD		100%	836.692.824
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen peralatan listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	BKD PROVINSI LAMPUNG	12paket	8.000.000	APBD		12paket	8.400.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	BKD PROVINSI LAMPUNG	12paket	5.500.000	APBD		12paket	5.775.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	BKD PROVINSI LAMPUNG	12paket	12.000.000	APBD		12paket	12.600.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	BKD PROVINSI LAMPUNG	12paket	20.000.000	APBD		12paket	21.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	BKD PROVINSI LAMPUNG	12paket	25.000.000	APBD		12paket	26.250.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	BKD PROVINSI LAMPUNG	30Laporan	50.000.000	APBD		30Laporan	52.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BKD PROVINSI LAMPUNG	61Laporan	676.350.309	APBD		61Laporan	710.167.824

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pelayanan Jasa perkantoran yang tersedia	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	564.648.055	APBD		100%	592.880.458
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan pembayaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	BKD PROVINSI LAMPUNG	12laporan	247.248.055	APBD		12laporan	259.610.458
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Jasa Tenaga Pelayanan Umum kantor yang disediakan	BKD PROVINSI LAMPUNG	12laporan	317.400.000	APBD		12laporan	333.270.000
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik yang tersedia	BKD PROVINSI LAMPUNG	100%	564.131.400	APBD		100%	592.337.970
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional / lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	BKD PROVINSI LAMPUNG	21unit	533.131.400	APBD		21unit	559.787.970
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	BKD PROVINSI LAMPUNG	46 unit	31.000.000	APBD		46 unit	32.550.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	BKD PROVINSI LAMPUNG	1 unit	0	APBD		1 unit	0
Program Kepegawaian Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang ditingkatkan	BKD PROVINSI LAMPUNG	80%	3.250.600.000	APBD		80%	3.413.130.000
PENGADAAN PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	Persentase sistem informasi kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian	BKD PROVINSI LAMPUNG	80%	805.600.000	APBD		80%	845.880.000
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	BKD PROVINSI LAMPUNG	9 dokumen	400.000.000	APBD		9 dokumen	420.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	BKD PROVINSI LAMPUNG	615dokumen	44.600.000	APBD		615dokumen	46.830.000
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi	BKD PROVINSI LAMPUNG	1 lembaga	200.000.000	APBD		1 lembaga	210.000.000
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKD PROVINSI LAMPUNG	185 dokumen	91.000.000	APBD		185 dokumen	95.550.000
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	BKD PROVINSI LAMPUNG	15000 dokumen	70.000.000	APBD		15000 dokumen	73.500.000
PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	Persentase pengembangan jabatan sesuai kompetensi, ujian dinas, upkp dan Penataan dan Pembinaan jabatan fungsional	BKD PROVINSI LAMPUNG	80%	780.000.000	APBD		80%	819.000.000
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN Meningkat kapasitasnya	BKD PROVINSI LAMPUNG	595 orang	150.000.000	APBD		595 orang	157.500.000
Pengelolaan Assesment Center		BKD PROVINSI LAMPUNG		365.000.000	APBD			383.250.000
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	BKD PROVINSI LAMPUNG	350 orang	200.000.000	APBD		350 orang	210.000.000
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	BKD PROVINSI LAMPUNG	200 dokumen	65.000.000	APBD		200 dokumen	68.250.000
MUTASI DAN PROMOSI ASN	Persentase pelayanan administrasi ASN dan penataan jabatan ASN	BKD PROVINSI LAMPUNG	75%	1.539.000.000	APBD		75%	1.615.950.000

Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi , jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	BKD PROVINSI LAMPUNG	850 dokumen	40.000.000	APBD		850 dokumen	42.000.000
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	BKD PROVINSI LAMPUNG	14 laporan	49.000.000	APBD		14 laporan	51.450.000
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengembangan promosi ASN	BKD PROVINSI LAMPUNG	10dokumen	1.450.000.000	APBD		10dokumen	1.522.500.000
PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	Persentase kinerja aparatur dan Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung	BKD PROVINSI LAMPUNG	75%	126.000.000	APBD		75%	132.300.000
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	BKD PROVINSI LAMPUNG	12 dokumen	75.000.000	APBD		12 dokumen	78.750.000
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	BKD PROVINSI LAMPUNG	15 orang	51.000.000	APBD		15 orang	53.550.000
JUMLAH				22.081.788.116,00				23.185.877.522

Bandar Lampung,

Februari 2025

Mengetahui,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



MEIRY HARIKA SARI, S.STP.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19770505 199712 2 001